

# Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

## (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar)

**Ainun Nasriah<sup>1\*</sup>, Fadjar Harimurti<sup>2</sup>**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia<sup>1</sup>  
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia<sup>2</sup>

\*Email Korespondensi: ainunnasriah27@gmail.com

Diterima: 16-09-2024 | Disetujui: 17-09-2024 | Diterbitkan: 18-09-2024

### ABSTRACT

*Local Revenue is a source of revenue obtained by local governments, not only from the utilisation of resources owned by the government, but also from the implementation of various government activities and the provision of services to the community. This study aims to analyse the effect of local taxes, local levies, and the results of the management of separated regional assets on local revenue. The population in this study was the Karanganyar Regency budget realisation report for 2013-2014. A total of 37 samples were used in this study, which were obtained using the Nonprobability Sampling technique. This study uses secondary data as the main source. The analytical methods applied include multiple linear regression, t test, f test, and coefficient of determination. The results showed that Local Taxes have a significant positive influence on Local Revenue, while Local Retribution does not show a negative significant influence, and Local Wealth Management Results have a significant positive influence on Local Revenue.*

**Keywords:** Local Taxes; Local Levies; Results of Management of Separated Wealth; Local Own-Source Revenue

### ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, bukan hanya dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga dari pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2013-2014. Sebanyak 37 sampel digunakan dalam penelitian ini, yang diperoleh dengan teknik Nonprobability Sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Metode analisis yang diterapkan meliputi regresi linier berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara Retribusi Daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan yang negatif, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Katakunci:** Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan; Pendapatan Asli Daerah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nasriah, A., & Harimurti, F. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 472-483. <https://doi.org/10.62710/41ctxg13>

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan dana dari hasil daerah. Salah satu pendapatan yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari: 1) hasil pajak Daerah, 2) hasil retribusi Daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapat asli Daerah yang sah. Sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, seluruh penerimaan daerah yang bersifat kas, termasuk pajak daerah dan penerimaan lainnya, wajib dikonsolidasikan ke dalam rekening kas umum daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi keuangan daerah. (Casroni et al., 2022).

Sebagai indikator kinerja fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merefleksikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal serta efisiensi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Daerah yang dianggap maju adalah daerah dengan tingkat PAD yang tinggi. Kebutuhan atas sumber pendapatan dana ini tentunya akan semakin dirasakan perlu oleh daerah apalagi mulai diterapkan peraturan dari provinsi yang berkaitan dengan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sudah sejak lama di Indonesia. Dengan diberikannya kebijakan otonomi kepada setiap daerah maka hal tersebut memicu kemungkinan datangnya suatu kebijakan yang terkait untuk dapat mengelola atau bahkan menjalankan sendiri rumah tangga pemerintahannya dalam jangkauan yang lebih luas, nyatadan secara lebih bertanggung jawab serta mampu dalam memaksimalkan daya guna hasil dari melakukan pemerintahannya yang memiliki tujuan dalam rangka terhadap bantuan masyarakat luas, serta diharapkan akan dengan lebih mudah menunaikan kebutuhan daerahnya demi terlaksananya kesejahteraan masyarakat luas di daerahnya tersebut (Mubarok nur, 2016)

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 29 kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa tengah. Pemerintah kabupaten Karanganyar dalam usaha untuk membangun dan mengembangkan daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah terbentuk dari penerimaan pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengurusan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dengan adanya implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah diminta harus lebih cerdas dalam menata kinerja keuangan daerahnya. Dalam pengelolaan kinerja keuangan daerahnya, pemerintah daerah membutuhkan informasi tentang kepiawaian terbesar penerimaan pendapatan asli daerah yang dimiliki sehingga perlu mengetahui penerimaan daerah apa saja yang

mempengaruhi pendapatan asli daerah.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2023**

PAD			
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
2013	127.674.671.000,00	161.715.929.349,00	126,66
2014	169.485.826.000,00	215.298.860.199,00	127,03
2015	218.658.689.000,00	255.445.549.750,00	116,82
2016	250.472.357.000,00	301.307.800.956,00	120,29
2017	381.557.551.385,00	415.142.563.370,00	108,8
2018	327.100.643.000,00	343.156.469.167,00	104,91
2019	352.420.926.000,00	387.763.013.293,00	112,57
2020	341.722.577.000,00	384.682.993.533,00	112,58
2021	426.291.144.000,00	426.649.591.411,00	99,85
2022	438.373.541.542,00	511.737.349.879,00	116,74
2023	232.578.312.806,00	262.901.554.630,00	113,37

(Sumber: Badan Keuangan Kab. Karanganyar, 2023)

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa PAD daerah yang bersangkutan terdapat peningkatan yang signifikan pada realisasi PAD antara tahun 2013 dan 2022. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup baik selama periode tersebut. Tahun 2020 mencatat penurunan persentase realisasi yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor perekonomian.

Penelitian sebelumnya telah secara konsisten menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Saputri, 2019; Sri Mulyani & Ramdini, 2021). Namun demikian, temuan yang kontradiktif juga ditemukan dalam literatur, di mana terdapat penelitian yang tidak berhasil membuktikan hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut (Sari & Miftahuljannah, 2019). Meskipun pajak daerah merupakan sumber utama PAD, retribusi daerah juga memiliki kontribusi yang signifikan. Penelitian empiris yang ada, seperti Anasta dan Nengsih (2019), umumnya mendukung hipotesis bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Namun, hasil penelitian Afiyah dan Masyitah (2023) serta Sri Mulyani dan Ramdini (2021) menunjukkan hasil yang kontradiktif. Perbedaan hasil ini mengindikasikan kompleksitas hubungan antara retribusi daerah dan PAD yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Perbedaan temuan antara penelitian Jafar Pangestu dkk.

(2023) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap PAD dengan penelitian Kusuma dan Iskandar (2022) serta Suharyadi dkk. (2018) yang tidak mendukung temuan tersebut menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi kontribusi variabel ini terhadap PAD.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa LRA selama periode (2013-2023) sebagai unit analisis. Sampel penelitian berjumlah 37 observasi LRA yang diperoleh dari website Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan Analisis Deskriptif

**Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	37	27,67	37,36	29,1254	1,65823
Retribusi Daerah	37	24,11	30,79	27,6527	1,67760
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	37	23,09	25,74	25,1051	,45084
Pendapatan Asli Daerah	37	24,96	31,66	28,0405	1,62134
Valid N (listwise)	37				

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Berdasarkan analisis deskriptif, diperoleh data sebanyak 37 observasi untuk variabel penelitian. Variabel Pajak Daerah menunjukkan rentang nilai antara 27,67 hingga 37,36 dengan rata-rata 29,1254 dan deviasi standar 1,65823. Variabel Retribusi Daerah memiliki rentang nilai 24,11 hingga 30,79, rata-rata 27,6527, dan deviasi standar 1,67760. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan memiliki rentang nilai 23,09 hingga 25,74, rata-rata 25,1051, dan deviasi standar 0,45084. Terakhir, variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki rentang nilai 24,96 hingga 31,66, rata-rata 28,0405, dan deviasi standar 1,6213.

## Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-57,643	10,444		-5,519	,000		
Pajak Daerah	1,027	,095	1,051	10,852	,000	,703	1,421
Retribusi Daerah	,098	,082	,101	,1,191	,242	,917	1,091
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	2,114	,346	,588	6,108	,000	,712	1,404

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Hasil menunjukkan nilai tolerance X1(Pajak Daerah) = 0,703, X2 (Retribusi Derah) = 0,917, dan X3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan) = 0,712 > 10 dan Nilai VIF untuk variabel X1(Pajak Daerah) = 1,421, X2 (Retribusi Derah) = 1,1091, dan X3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan) = 1,404 < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas atau model regresi tersebut lolos uji multikolinearitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate	Durbin-Watson
1	,842 <sup>c</sup>	,709	,682	,58907	1,706

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Pada tabel diatas bahwa nilai Durbin Watson yang didapat sebesar 1,706. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas dan sampel sebanyak 37, maka  $D_u = 1,6550$  dan  $D_l = 1,3068$  Sehingga penilaian nilai Durbin-Watson diatas dengan perhitungan;  $D_u < \text{nilai D-W} < 4 - D_u = 1,6550 < 1,706 < 4 - 1,6550 = 1,6550 < 1,706 < 2,345$ . Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

*Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar)*  
(Nasriah, et al.)

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coeficien	t	Sig.
1 (Constant)	4,429	2,865		1,546	,132
Pajak Daerah	-,044	,089	-,118	-,492	,626
Retribusi Daerah	,033	,055	,107	,593	,558
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	-,403	,252	-,404	-1,596	,120

a. Dependent Variable: ABSRes\_1

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Hasil menunjukkan p-value signifikansi dari X1 (Pajak Daerah) = 0,626, X2 (Retribusi Daerah) = 0,558 dan X3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan) = 0,120 > 0,05 (tidak signifikan) ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas (lulus uji heteroskedastisitas).

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		LAG_RES
N		37
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	5,2932
	Std. Deviation	,15402
Most Extreme Differences	Absolute	,206
	Positive	,101
	Negative	-,206
Test Statistic		,206
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,075 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,068
	Upper Bound	,082

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Analisis normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan simulasi Monte Carlo (dua

*Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar)*  
(Nasriah, et al.)

sis) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,075 ( $p > 0,05$ ) mengindikasikan distribusi residual yang tidak dapat ditolak hipotesis normalitasnya.

### Hasil dan Pembahasan Uji Hipotesis

**Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-23,703	4,642		5,106	000
	Pajak Daerah	1,221	,144	1,157	8,510	000
	Retribusi Daerah	,090	,089	,104	1,009	321
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	2,243	,409	,787	5,489	000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Hasil analisis tabel diatas didapatkan 1,221 (Koefisien regresi untuk variabel pajak daerah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah.), 0,090 (Koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah juga menunjukkan pengaruh positif, namun dengan tingkat signifikansi yang perlu diuji lebih lanjut.), selanjutnya hasil analisis mendapatkan nilai 2,243 (Koefisien regresi untuk variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang paling kuat terhadap pendapatan asli daerah di antara ketiga variabel independen.).

**Tabel 8. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-23,703	4,642		5,106	000
	Pajak Daerah	1,221	,144	1,157	8,510	000
	Retribusi Daerah	,090	,089	,104	1,009	321
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	2,243	,409	,787	5,489	000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

*Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar)*  
(Nasriah, et al.)

Berdasarkan hasil uji signifikansi, diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 untuk variabel Pajak Daerah. Karena nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji signifikansi menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan nilai p-value sebesar 0,321 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,000 yang sangat kecil.

**Tabel 9. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	27,091	3	9,030	26,023
	Residual	11,104	32	,347	
	Total	38,195	35		

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 26,023 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya dapat dikatakan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen yaitu pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah( $X_2$ ), dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).

**Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,842 <sup>a</sup>	,709	,682	,58907

a.Predictors: (Constant), Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak

(Sumber: SPSS 25 Data diolah, 2024)

Hasil Menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted  $R^2$ ) untuk model ini adalah 0,628 artinya besaran sumbangan pengaruh variabel independen  $X_1$  (Pajak Daerah)  $X_2$  (Retribusi Daerah)  $X_3$  (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) terhadap  $Y$  (Pendapatan Asli Daerah) sebesar

68,2%. Sisanya (100% - 68,2%) = 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Berdasarkan hasil uji t- hitung sebesar 8,510 dengan p-value sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang positif signifikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013-2023. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa "Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbukti kebenarannya". Artinya semakin meningkatnya pajak daerah maka semakin besar juga pendapatan asli daerah tersebut. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah memberikan tunjangan paling besar pada Pendapatan Asli Daerah yang dipakai untuk membagikan pelayanan publik yang baik dan ketentraman kepada masyarakat. Perolehan pendapatan asli daerah yang tinggi akan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah akan pemerintah pusat dan otonomi suatu daerah akan semakin bagus. Sehingga jika semakin tinggi atau rendah pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi atau rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh (Zulfikar & Ardelia, 2023) dan (Casroni et al., 2022) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Berdasarkan hasil uji t- hitung sebesar 1,009 dengan p-value sebesar  $0,321 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang positif signifikan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013-2023. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa "Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti kebenarannya". Hasil penelitian ini didukung oleh teori agensi dimana Retribusi daerah biasanya adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk layanan atau penggunaan fasilitas tertentu, dan biasanya lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, regulasi, dan kebutuhan pendanaan daerah daripada masalah agensi. Keputusan tentang retribusi daerah sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politis dan ekonomi lokal, seperti kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik, yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan konsep-konsep dalam teori agensi. pada teori agensi juga diterapkan pada retribusi daerah. Hasil penelitian ini didukung (Budiman et al., 2021) dan (Saputri, 2019) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan retribusi tergolong masih rendah. Hal ini juga terjadi di kabupaten Karanganyar yang nilai penerimaan retribusi daerhnya masih tergolong rendah. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak atau pengguna jasa tidak mematuhi kewajiban membayar retribusi dengan tepat sehingga realisasi penerimaan pendapatan retribusi tidak dapat tercapai. Kebijakan Pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi pengelolaan retribusi daerah seperti regulasi perpajakan atau perubahan kebijakan pajak di tingkat pusat, seperti tarif pajak atau objek pajak yang dikenakan.

### **Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Berdasarkan hasil uji t- hitung sebesar 5,489 dengan p-value sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya terdapat pengaruh yang positif signifikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terhadap

---

*Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar)*  
(Nasriah, et al.)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013-2023. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “ Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbukti kebenarannya”. Artinya semakin meningkat Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan maka Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat. Dengan adanya perusahaan milik daerah atau swasta yang ada pada wilayah pemerintahan suatu daerah tentu akan menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya memaksimalkan pendapatan dari sektor perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah untuk rancangan pembangunan. Jenis penerimaan yang termasuk dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat. (Natsir et al., 2023). Hasil penelitian ini didukung oleh (Kireina & Octaviani, 2021) dan (Natsir et al., 2023) yang menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## KESIMPULAN

Analisis regresi menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar. Meskipun Retribusi Daerah juga berkontribusi positif terhadap PAD, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah ketersediaan data yang tidak lengkap, terutama terkait dengan data historis mengenai investasi daerah. Hal ini menghambat analisis yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, J., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli Serdang. *Journal on Education*, 06, 9680–9691.
- Budiman, A. I., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas*, 15(2), 329– 348. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12977>
- Casroni, Wulandari, H. K., Dumadi, & Erniwati, Y. (2022). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016- 2021). *Jurnal Kewaganegaraan*, 6(3), 5515–5525. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3971>
- Jafar Pangestu, M., Nugroho Rachman, A., Wulandari, A., Studi Akuntansi Perpajakan, P., & Surakarta, S. (2023). The Influence of Tax Sanctions, Tax Dissemination, Rational Attitudes and Taxpayer Awareness of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Surakarta City. *Manajemen Dan Akuntansi*,

---

*Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar)*  
(Nasriah, et al.)

- 3(2), 2023. <http://jibaku.unw.ac.id>
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Semarang Periode Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Kusuma, M. S. R., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Advance :Jurnal Akuntansi*, 9(1), 30–40. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>
- Mubarok nur, D. H. (2016). POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN KONTRIBUSI SERTA PROSPEKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 18, 1411–1713.
- Natsir, A. A., Sylvia, & Kitta, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Inflasi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Ghendra Buana Jurnal*, 1(5), 492–506. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj%7C492>
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>
- Sari, W. P., & Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Jeornal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 120–125.
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Zulfikar, W. A., & Ardelia, A. S. (2023). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak Tahun 2020-2022. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM*.